



EKONOMI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Dr. Ris Yuwono Yudo Nugroho, S. E., M.Si.
Atiqa Azza El Darman, S.A.P., M.A.P
Micha Snoverson Ratu Rihi, SP., M.Si
Dr. Muhammad Ihsan Said Ahmad, SE., M.Si
Viona Nainggolan, S.P., M.Si
Sri Wahyunawati, S.Hut, MM
Prof. Dr. Ir. Saidin Nainggolan, M.Si.
Wilianita Selviana Panetty, SE., M.Ak
Dr. Andi Herman Jaya, S.E., M.Si.



Editor: Dr. Nisma Iriani, S.E., M.Si., M.M

EKONOMI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Dr. Ris Yuwono Yudo Nugroho, S. E., M.Si.

Atiqah Azza El Darman, S.A.P., M.A.P

Micha Snoverson Ratu Rihi, SP., M.Si

Dr. Muhammad Ihsan Said Ahmad, SE., M.Si

Viona Nainggolan, S.P., M.Si

Sri Wahyunawati, S.Hut, MM

Prof. Dr. Ir. Saidin Nainggolan, M.Si.

Wilianita Selviana Pangetty, SE., M.Ak

Dr. Andi Herman Jaya, S.E., M.Si.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026201016, 15 Oktober 2026

Pencipta
Nama : Dr. Rir Yuwono Yudo Nugroho, S. E., M.Si., Atiq Azza El Darman, S.A.P., M.A.P dkk.
Alamat : Perum Taloon Pemas L No. 14, RT RW 003/007, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur, Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur 69162
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : Dr. Rir Yuwono Yudo Nugroho, S. E., M.Si., Atiq Azza El Darman, S.A.P., M.A.P dkk.
Alamat : Perum Taloon Pemas L No. 14, RT RW 003/007, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur, Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur 69162
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku
Judul Ciptaan : EKONOMI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Tanggal dan tempat ditunjukkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 15 Oktober 2026, di Kab. Sukoharjo

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001545401

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atas produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Heni Masnah Siregar, S.H., M.H.
NIP. 197010161992031001



Disahkan:

1. Dalam hal prosedur pemberian keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melakukan pemeriksaan.
2. Surat Pencatatan ini telah diunggah secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat diunduh kembali dengan menggunakan kode QR pada dokumen ini dan informasi akan diunggah dalam database.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Ris Yawono Yudo Nugroho, S.E., M.Si	Perum Taloon Permata L No. 14 RT/RW 003/007, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur
2	Anqa Azza El Darsan, S.A.P.,M.A.P	Padi Residence Blok C09/38 Jl. Yusuf Basyir, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
3	Micha Suoverson Rani Riki, SP, M.Si	Jalan Salak, RT 016/RW 007 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Kode Pos: 85142
4	Dr. Muhammad Ihsan Said Ahmad, SE., M.Si	Gerya Minasa Sari Blok A No 3 RT.04 RW.05 Kal. Minasa Upa Kac. Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan 90221
5	Viona Nanggolana, S.P., M.Si	Jl. Bumi II No 4, Kelapa Lima, Kota Kupang
6	Sri Wahyuniwati, S.Hut, MM	Kelapa Lima, Kota Kupang
7	Prof. Dr. Ir. Saldin Nanggolana, M.Si	Jl. Pelita Raya No. 4 RT. 15 RW/002 Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan
8	Wilsonita Selviriana Pangerty, SE, M.Ak	Jln. Sunan Ampel Komplek Kejora Permata No. 4 Kelurahan Suka Karya Kota Bontol Kota Baru, Kota Jambi
9	Dr. Andi Herman Jaya, S.E., M.Si	Jl. Torondemba No. 17B Tentena, Pamona Puselemba Kabupaten Poso Sulawesi Tengah
		Pamona Puselemba, Kab. Poso
		Perumahan Bumi Tondo Atri C 10 Jalan Unad I Kelurahan Tondo Pahu Mintulure, Kota Palu

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. Ris Yawono Yudo Nugroho, S.E., M.Si	Perum Taloon Permata L No. 14 RT/RW 003/007, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur
2	Anqa Azza El Darsan, S.A.P.,M.A.P	Padi Residence Blok C09/38 Jl. Yusuf Basyir, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
3	Micha Suoverson Rani Riki, SP, M.Si	Jalan Salak, RT 016/RW 007 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Kode Pos: 85142
		Maulafa, Kota Kupang



Diketahui:

1. Daftar ini pernah diterbitkan sehingga tidak sesuai dengan saat penyusunan. Maafkan kesalahan untuk kesalahan saat penyusunan.
2. Nama Pencipta ini telah diunggah secara elektronik menggunakan alat elektronik yang terhubung oleh Balai Besar Surfactant Elektronik, Balai Siber dan Sastra Negeri.
3. Nama Pencipta ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan memeriksa kode QR pada dokumen ini dan informasi akan diunggah dalam browser.



4	Dr. Muhammad Ihsan Said Ahmad, SE., M.Si	Griya Mimasa Sari Blok A No 3 RT04/RW03 Kel. Mimasa Ups Kec. Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan 90221 Rappocini, Kota Makassar
5	Viona Nainggolan, S.P., M.Si	Jl. Bumi II No 4, Kelapa Lima, Kota Kupang Kelapa Lima, Kota Kupang
6	Sri Wahyunawati, S.Hut, MM	Jl. Pelita Raya No. 4 RT 15/RW002 Desa Selatan, Kab. Barito Selatan
7	Prof. Dr. Ir. Saidin Nainggolan, M.Si	Jln. Sultan Ampel Kemp Kajaya Permai No. 4 Kelurahan Suka Karya Kota Baru Kota Baru Kota Baru, Kota Jambi
8	Wihanita Selvirana Pangesty, SE, M.Ak	Jl. Torulenda No. 17B Tentena, Pamona Puncelenda Kabupaten Poso Sulawesi Tengah Pamona Puncelenda, Kab. Poso
9	Dr. Andi Hermas Jaya, S.E., M.Si	Perumahan Bumi Tondo Asri C 10 Jalan Ujung I Kelurahan Tondo Palu Mamukore, Kota Palu



Disclaimer:

1. Dalam hal prosedur pendaftaran keanggotaan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Negeri keanggotaan tidak menerima surat pernyataan pendaftaran.
2. Surat Pendaftaran ini tidak dapat secara otomatis digantikan dengan dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pendaftaran ini dapat ditukarkan keanggotaan dengan memindai Kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

EKONOMI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Penulis:

Dr. Ris Yuwono Yudo Nugroho, S. E., M.Si.
Atiqa Azza El Darman, S.A.P.,M.A.P
Micha Snoverson Ratu Rihi, SP., M.Si
Dr. Muhammad Ihsan Said Ahmad, SE., M.Si
Viona Nainggolan, S.P., M.Si
Sri Wahyunawati, S.Hut, MM
Prof. Dr. Ir. Saidin Nainggolan, M.Si.
Wilianita Selviana Pangetty, SE.,M.Ak
Dr. Andi Herman Jaya, S.E., M.Si.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Dr. Nisma Iriani, S.E., M.Si., M.M

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

xiii, 358, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-330-5

Cetakan Pertama:

Oktober 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab penerbit

Copyright © 2026 by Tahta Media Group

All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,

Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku “Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan” ini dapat diselesaikan dan hadir di tengah pembaca. Buku ini disusun sebagai salah satu kontribusi akademik dalam memperkaya pemahaman mengenai konsep, dinamika, kebijakan, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan ekonomi.

Pembangunan merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan suatu negara dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menciptakan kesempatan kerja, memperkuat kelembagaan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ekonomi pembangunan perlu ditempatkan dalam perspektif yang luas, kontekstual, dan relevan dengan berbagai perubahan yang terjadi pada tingkat nasional maupun global.

Buku ini menghadirkan pembahasan secara sistematis mengenai hakikat dan ruang lingkup ekonomi pembangunan, sejarah dan dinamika kebijakan pembangunan nasional Indonesia, kemiskinan dan ketimpangan beserta kebijakan penanggulangannya, modal manusia melalui pendidikan dan kesehatan, pembangunan pertanian dan industri, pembiayaan pembangunan dan kebijakan fiskal, integrasi ekonomi global serta dampaknya bagi negara berkembang, hingga evaluasi, tantangan, dan arah masa depan ekonomi pembangunan. Rangkaian pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai pembangunan, mulai

dari landasan konseptual hingga persoalan dan kebijakan yang dihadapi dalam praktik.

Di tengah dinamika perubahan ekonomi global, transformasi teknologi, persoalan ketimpangan, perubahan iklim, serta tuntutan terhadap pembangunan yang semakin inklusif dan berkelanjutan, kajian mengenai ekonomi perencanaan dan pembangunan menjadi semakin penting. Perencanaan pembangunan tidak lagi cukup hanya berorientasi pada peningkatan indikator ekonomi makro, tetapi juga perlu mempertimbangkan kualitas pertumbuhan, pemerataan kesempatan, pembangunan manusia, ketahanan ekonomi, kualitas kelembagaan, serta keberlanjutan lingkungan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, akademisi, peneliti, praktisi, perencana pembangunan, pengambil kebijakan, serta masyarakat umum yang ingin memahami berbagai aspek ekonomi perencanaan dan pembangunan. Akhir kata, semoga buku “Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan” ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta menjadi salah satu referensi dalam memahami dan merumuskan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 HAKIKAT DAN RUANG LINGKUP EKONOMI	
PEMBANGUNAN.....	1
Dr. Ris Yuwono Yudo Nugroho, S. E., M.Si.....	1
Universitas Trunodjoyo Madura	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Ekonomi	5
C. Evolusi Makna Dan Orientasi Pembangunan.....	17
D. Tujuan, Dimensi, Dan Indikator Pembangunan	27
E. Ruang Lingkup Ekonomi Pembangunan.....	38
Daftar Pustaka.....	45
Profil Penulis	47
BAB 2 PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA: SEJARAH	
DAN DINAMIKA KEBIJAKAN.....	48
Atiqa Azza El Darman, S.A.P.,M.A.P	48
Universitas Negeri Makassar	48
A. Pendahuluan.....	48
B. Konsep Dan Teori Pembangunan Nasional.....	50
C. Sejarah Pembangunan Nasional Indonesia.....	54
D. Peran Lembaga Dan Aktor Dalam Pembangunan Nasional	61
E. Dinamika Kebijakan Pembangunan Nasional.....	62
F. Tantangan Dan Prospek Pembangunan Nasional Ke Depan	65
G. Penutup	69
Daftar Pustaka.....	71
Profil Penulis	73

BAB 3 KEMISKINAN, KETIMPANGAN, DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGANNYA	75
Micha Snoverson Ratu Rihi, SP., M.Si	75
Politeknik Pertanian Negeri Kupang.....	75
A. Pendahuluan.....	75
B. Konsep Dan Pengukuran Kemiskinan	78
C. Penyebab Dan Perangkap Kemiskinan	85
D. Ketimpangan: Konsep, Ukuran, Dan Dinamika.....	92
E. Profil Kemiskinan Dan Ketimpangan Di Indonesia	100
F. Kebijakan Dan Program Penanggulangan Kemiskinan	107
G. Arah Kebijakan Ke Depan.....	116
H. Penutup	118
Daftar Pustaka.....	122
Profil Penulis	130
BAB 4 MODAL MANUSIA, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DALAM PEMBANGUNAN	131
Dr. Muhammad Ihsan Said Ahmad, SE., M.Si.....	131
Universitas Negeri Makassar	131
A. Pendahuluan.....	131
B. Modal Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan	135
C. Pendidikan Dan Kesehatan Sebagai Investasi Modal Manusia	148
D. Modal Manusia, Kemiskinan, Ketimpangan, Dan Perencanaan Pembangunan Indonesia.....	161
E. Implikasi Perencanaan Dan Agenda Kebijakan Masa Depan	173
F. Kesimpulan	179
Daftar Pustaka.....	183
Profil Penulis	188

BAB 5 PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN INDUSTRY:	
TANTANGAN DAN STRATEGI.....	189
Viona Nainggolan, S.P., M.Si.....	189
Politeknik Pertanian Negeri Kupang.....	189
A. Pendahuluan.....	189
B. Konsep Dan Hakikat Pembangunan Pertanian.....	191
C. Konsep Dan Peran Pembangunan Industri	193
D. Keterkaitan Pembangunan Pertanian Dan Industri.....	195
E. Kondisi Dan Dinamika Pembangunan Pertanian Indonesia	197
F. Kondisi Dan Dinamika Pembangunan Industri Indonesia.	199
G. Tantangan Pembangunan Pertanian.....	200
H. Tantangan Pembangunan Industri	202
I. Strategi Pembangunan Pertanian.....	204
J. Strategi Pembangunan Industri.....	205
K. Strategi Integrasi Pertanian Dan Industri.....	207
L. Perencanaan Pembangunan Pertanian Dan Industri.....	210
M. Pembangunan Pertanian Dan Industri Berkelanjutan.....	211
N. Studi Kasus Pembangunan Pertanian Dan Industri Di Indonesia	213
O. Arah Masa Depan Pembangunan Pertanian Dan Industri .	214
Daftar Pustaka.....	216
Profil Penulis	218
BAB 6 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN: UTANG LUAR	
NEGERI DAN KEBIJAKAN FISKAL	220
Sri Wahyunawati, S.Hut, MM.....	220
STIE Dahani Dahanai.....	220
A. Pendahuluan.....	220
B. Konsep Dasar Pembiayaan Pembangunan	224
C. Utang Luar Negeri Dan Kebijakan Fiskal	237

D. Penutup	251
Daftar Pustaka.....	253
Profil Penulis	255
BAB 7 INTEGRASI EKONOMI GLOBAL DAN DAMPAKNYA	
BAGI NEGARA BERKEMBANG.....	256
Prof. Dr. Ir. Saidin Nainggolan, M.Si.	256
Universitas Jambi	256
A. Pendahuluan.....	256
B. Konsep Dasar Integrasi Ekonomi Global	258
C. Dampak Integrasi Ekonomi Global Bagi Negara Berkembang	266
D. Evaluasi Dampak Integrasi Ekonomi Global.....	274
E. Strategi Dan Kebijakan Untuk Menghadapi Dampak Integrasi Ekonomi Global.....	277
F. Kebijakan Pemerintah Untuk Menghadapi Integrasi Ekonomi Global.....	283
G. Rangkuman.....	294
Daftar Pustaka.....	296
Profil Penulis	299
BAB 8 TRANSFORMASI KEBIJAKAN PUBLIK MENUJU	
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN:	
PERSPEKTIF EKONOMI DAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	300
Wilianita Selviana Pangetty, SE.,M.Ak	300
Universitas Kristen Tentena	300
A. Pendahuluan.....	300
B. Konsep Kebijakan Publik Dan Pembangunan Berkelanjutan	306
C. Konsep Pembangunan Berkelanjutan.....	307
D. Konsep Transformasi Kebijakan Publik Di Indonesia	307

E. Perubahan Paradigma Kebijakan Publik Di Indonesia	308
F. Transformasi Dari Government Menuju Governance	309
G. Transformasi Kebijakan Berbasis Data	311
H. Transformasi Dari Output Menuju Outcome Dan Impact..	313
I. Transformasi Kebijakan Untuk Pembangunan Berkelanjutan	315
J. Tantangan Transformasi Kebijakan Publik Di Indonesia ...	317
K. Relevansi Transformasi Kebijakan Dengan Ekonomi Dan Akuntansi Sektor Publik	318
Daftar Pustaka.....	320
Profil Penulis	321
BAB 9 EVALUASI, TANTANGAN, DAN ARAH MASA DEPAN EKONOMI PEMBANGUNAN	322
Dr. Andi Herman Jaya, S.E., M.Si.....	322
Universitas Tadulako.....	322
A. Pendahuluan.....	322
B. Evaluasi Pembangunan Ekonomi	325
C. Capaian Dan Permasalahan Pembangunan Ekonomi	329
D. Tantangan Ekonomi Pembangunan Masa Kini.....	332
E. Arah Baru Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi.....	336
F. Strategi Pembangunan Ekonomi Masa Depan	342
G. Prospek Ekonomi Pembangunan Di Masa Depan	347
H. Penutup	351
Daftar Pustaka.....	355
Profil Penulis	358

BAB 1

HAKIKAT DAN RUANG LINGKUP EKONOMI PEMBANGUNAN

Dr. Ris Yuwono Yudo Nugroho, S. E., M.Si.

Universitas Trunodjoyo Madura

A. PENDAHULUAN

Pembangunan menempati posisi penting dalam perjalanan suatu negara karena berkaitan dengan upaya memperbaiki keadaan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Melalui pembangunan, pemerintah dan masyarakat berusaha meningkatkan kemampuan produksi, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki pelayanan dasar. Namun, pembangunan bukanlah proses yang sederhana. Bertambahnya investasi, infrastruktur, dan pendapatan nasional belum selalu menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat secara keseluruhan telah menjadi lebih baik.

Dalam kehidupan sehari-hari, pembangunan sering dikenali melalui perubahan fisik yang mudah diamati. Jalan diperlebar, kawasan industri dibuka, fasilitas pendidikan dan kesehatan dibangun, serta pusat perdagangan baru berkembang. Semua itu diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi, tetapi keberadaannya belum menjamin manfaat yang merata. Sebuah daerah dapat memiliki infrastruktur yang semakin baik, sementara sebagian penduduknya masih sulit memperoleh pekerjaan yang layak. Investasi juga dapat tumbuh tanpa membentuk keterkaitan yang kuat dengan

usaha lokal dan tenaga kerja setempat. Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang lebih luas daripada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan terutama menunjukkan peningkatan output riil suatu perekonomian dalam periode tertentu. Pembangunan mencakup pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan perubahan struktur produksi, produktivitas, distribusi pendapatan, kualitas pekerjaan, pelayanan dasar, dan kapasitas kelembagaan. Todaro dan Smith (2020) menempatkan pembangunan sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan ekonomi, sosial, dan kelembagaan.

Pertumbuhan tetap diperlukan karena menyediakan sumber daya untuk membiayai investasi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Akan tetapi, pertumbuhan tidak dapat ditempatkan sebagai tujuan yang berdiri sendiri. Pertumbuhan baru memiliki arti pembangunan apabila mampu memperluas kesempatan ekonomi dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Seers (1969) mengajukan tiga pertanyaan mendasar untuk menilai pembangunan: apa yang terjadi pada kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan? Apabila ketiganya tidak membaik, kenaikan pendapatan per kapita belum cukup kuat untuk disebut sebagai keberhasilan pembangunan. Pada tahap awal perkembangannya, ekonomi pembangunan memberikan perhatian besar pada kekurangan modal, rendahnya tabungan, keterbatasan infrastruktur, dan perlunya industrialisasi. Negara berkembang dipandang memiliki sektor tradisional yang menampung banyak tenaga kerja dengan produktivitas rendah. Pertumbuhan sektor modern diharapkan menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat akumulasi modal. Pemikiran Lewis (1954) mengenai perekonomian dual menjadi salah satu landasan untuk menjelaskan proses transformasi tersebut.

Pengalaman berbagai negara kemudian memperlihatkan bahwa industrialisasi dan akumulasi modal tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan serta pemerataan pendapatan. Pertumbuhan sektor modern dapat berlangsung tanpa menyerap tenaga kerja dalam jumlah memadai. Urbanisasi juga dapat bergerak lebih cepat daripada kemampuan kota menyediakan pekerjaan, perumahan, dan pelayanan publik. Perhatian ekonomi pembangunan selanjutnya meluas menuju kebutuhan dasar, distribusi pendapatan, kualitas institusi, dan pembangunan manusia. Perubahan tersebut menempatkan manusia bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai tujuan utama pembangunan. Pendidikan dan kesehatan memiliki nilai ekonomi karena meningkatkan produktivitas, tetapi keduanya juga memperluas kesempatan manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Sen (1999) menjelaskan pembangunan sebagai proses memperluas kebebasan substantif. Pendapatan merupakan sarana penting, tetapi tidak selalu mencerminkan kemampuan seseorang untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan, berpartisipasi, dan menentukan pilihan yang dianggap bernilai.

Pembangunan juga dipengaruhi oleh kualitas institusi. Keputusan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah berlangsung dalam aturan formal, norma sosial, dan distribusi kekuasaan tertentu. North (1990) menjelaskan bahwa institusi membentuk insentif dan biaya transaksi dalam kehidupan ekonomi. Kepastian hukum, kualitas birokrasi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik memengaruhi keputusan investasi serta efektivitas kebijakan. Negara yang memiliki sumber daya melimpah belum tentu mencapai hasil pembangunan yang baik apabila institusinya tidak mampu mengelola sumber daya tersebut secara produktif dan adil.

Perhatian terhadap institusi menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya bersifat teknis. Setiap kebijakan melibatkan pilihan

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik kesejahteraan rakyat 2025*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/10/10/b37dd4fb6b1727f8cf3c0271/statistik-kesejahteraan-rakyat-2025.html>
- Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2), 139–191. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
- Rodrik, D. (2007). *One economics, many recipes: Globalization, institutions, and economic growth*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400829354>
- Seers, D. (1969). *The meaning of development* (IDS Communication No. 44). Institute of Development Studies
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2009). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- United Nations Development Programme. (2025). *Human development report 2025: A matter of choice: People and possibilities in the age of AI*. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2025>

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (A/RES/70/1). <https://sdgs.un.org/2030agenda>

PROFIL PENULIS



Dr. Ris Yuwono Yudo Nugroho, S.E., M.Si

Penulis merupakan dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunodjoyo Madura. Pendidikan Sarjana Ekonomi Pembangunan diselesaikan di Universitas Airlangga, pendidikan Magister Ilmu Ekonomi Pertanian di Institut Pertanian Bogor, dan pendidikan Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Airlangga. Kegiatan pengajaran, penelitian, dan publikasinya terutama mencakup perekonomian Indonesia, ekonomi moneter, perkembangan sektor keuangan, keuangan Islam, ekonomi pariwisata, dan kebijakan pembangunan. Penulis aktif menghasilkan karya ilmiah serta terlibat dalam pengembangan pendidikan ekonomi dan berbagai kegiatan akademik. Beberapa buku dan *book chapter* terbarunya adalah Ekonomi Moneter: Teori, Kebijakan, dan Dinamika Sistem Keuangan Global (2026), Ekonomi Pembangunan: Teori, Kebijakan, dan Praktik di Era Global (2026), serta Perekonomian Indonesia: Struktur, Dinamika, dan Arah Pembangunan Nasional (2026). Profil karya ilmiah penulis dapat ditelusuri melalui Google Scholar dan ORCID 0000-0003-1271-0467.

Email: risyuwono@gmail.com

BAB 2

PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA: SEJARAH DAN DINAMIKA KEBIJAKAN

Atiqa Azza El Darman, S.A.P.,M.A.P

Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan agenda strategis yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sebagai bangsa yang baru merdeka, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk membangun fondasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya di tengah keterbatasan sumber daya serta warisan struktur kolonial yang timpang. Proses pembangunan tersebut tidak berjalan linear, melainkan mengalami pasang surut seiring dengan pergantian rezim pemerintahan, perubahan konstelasi politik, serta dinamika ekonomi global yang memengaruhi arah kebijakan nasional (Poesponegoro & Notosusanto, 2008).

Sepanjang delapan dekade sejak kemerdekaan, kebijakan pembangunan nasional Indonesia setidaknya dapat dipetakan ke dalam tiga periode besar, yaitu era Orde Lama (1945–1966), era Orde Baru (1966–1998), dan era Reformasi (1998 hingga sekarang). Ketiga periode ini masing-masing memiliki paradigma, instrumen perencanaan, serta orientasi kebijakan yang berbeda satu sama lain. Pada era Orde Lama, pembangunan lebih diwarnai oleh semangat

nasionalisme dan politik mercusuar di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Era Orde Baru kemudian menghadirkan model pembangunan yang lebih terencana dan tersentralisasi melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita (Rahmawati, 2022). Sementara itu, era Reformasi ditandai oleh transformasi mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan, dari model GBHN menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang lebih berorientasi pada visi dan misi presiden terpilih (Subkhan, 2014).

Dinamika pergantian model perencanaan pembangunan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perubahan konfigurasi politik, ideologi kekuasaan, serta paradigma ekonomi yang dominan pada setiap zamannya. Perubahan ini pada gilirannya menimbulkan persoalan mendasar terkait kesinambungan pembangunan lintas periode kepemimpinan, mengingat setiap presiden terpilih cenderung membawa visi pembangunan yang berbeda dari pendahulunya (Muhtamar, Razak, & Wahid, 2012). Fenomena inilah yang menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Kajian mengenai sejarah dan dinamika kebijakan pembangunan nasional menjadi semakin relevan mengingat Indonesia saat ini tengah berada pada fase penting menuju satu abad kemerdekaan pada tahun 2045. Pemahaman yang komprehensif atas keberhasilan maupun kegagalan kebijakan pembangunan pada masa lalu diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran berharga bagi perumusan kebijakan pembangunan pada masa kini dan masa mendatang, sehingga bangsa Indonesia tidak mengulangi kesalahan yang sama, sekaligus dapat mereplikasi berbagai keberhasilan kebijakan yang telah terbukti efektif pada konteks zamannya masing-masing.

Bab ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif sejarah dan dinamika kebijakan pembangunan nasional Indonesia, mulai dari landasan konseptual dan teoretis, perjalanan historis pada tiga era pemerintahan, hingga tantangan dan prospek pembangunan nasional di masa mendatang. Melalui kajian ini, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang utuh mengenai bagaimana kebijakan pembangunan nasional Indonesia dirumuskan, dilaksanakan, dan bertransformasi seiring dengan perubahan zaman.

B. KONSEP DAN TEORI PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Pengertian Pembangunan Nasional

Secara konseptual, pembangunan nasional dapat dimaknai sebagai suatu proses perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal, mencakup aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Pembangunan tidak semata dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi negara menuju kondisi kehidupan yang lebih baik (Todaro & Smith, 2020). Dalam konteks Indonesia, pembangunan nasional merupakan amanat konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- KPU Kabupaten Mamberamo Tengah. (2025). *GBHN: Sejarah, kontroversi, dan wacana kebangkitan kembali di era politik modern Indonesia*. Diakses dari laman resmi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Maula, N. (2025). Paradigma perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. *Bisnis Net: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1).
- Muhtamar, S., Razak, A., & Wahid, M. Y. (2012). *Relevansi perencanaan pembangunan nasional dengan amanat konstitusi (Studi tentang perbandingan arah kebijakan pembangunan hukum dalam GBHN dan RPJPN)*. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah nasional Indonesia: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia, ±1942–1998*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmawati. (2022). Repelita: Sejarah pembangunan nasional di era Orde Baru. *Etnohistori: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan*, 9(2), 36–42. <https://doi.org/10.33387/etnohistori.v9i2.5654>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Rostow, W. W. (1960). *The stages of economic growth: A non-communist manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Subianto, P. (2023). *Strategi transformasi bangsa: Menuju Indonesia Emas 2045*. Jakarta: t.p.
- Subkhan. (2014). GBHN dan perubahan perencanaan pembangunan di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(2). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i2.455>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). New York: Pearson.

PROFIL PENULIS



Atiqa Azza El Darman, S.A.P., M.A.P. merupakan dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S.A.P.) pada bidang Administrasi Publik dan melanjutkan pendidikan Magister Administrasi Publik (M.A.P.) dengan fokus pada kajian administrasi

negara, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan inovasi sektor publik. Sebagai akademisi, penulis aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pengajaran, penulis mampu berbagai mata kuliah, antara lain Kebijakan Publik, Birokrasi dan Governansi Publik, Manajemen Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan Publik, Ekologi Administrasi Publik, serta mata kuliah lain yang berkaitan dengan pengembangan administrasi publik kontemporer. Penulis memiliki ketertarikan dalam pengembangan metode pembelajaran berbasis teknologi digital melalui e-learning, e-module interaktif, Project-Based Learning (PjBL), Case Method, serta pemanfaatan Learning Management System (LMS) dalam mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi. Bidang penelitian yang menjadi fokus penulis meliputi kebijakan publik, reformasi birokrasi, governansi digital, pelayanan publik, inovasi sektor publik, smart governance, serta pengembangan kapasitas aparatur sipil negara. Hasil penelitian dan kajian ilmiah penulis telah dipublikasikan dalam berbagai artikel ilmiah, prosiding, dan karya akademik. Selain itu, penulis juga aktif menyusun buku ajar, modul pembelajaran, serta berbagai karya ilmiah sebagai kontribusi dalam pengembangan

literatur administrasi publik di Indonesia. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, penulis secara konsisten melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pendampingan kepada instansi pemerintah maupun lembaga pendidikan melalui pelatihan, workshop, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Melalui penulisan bab ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi pemerintahan. Besar harapan penulis agar karya ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Email: atiqaazzaeldarman@unm.ac.id

Google Scholar: Atiqa Azza El Darman, S.A.P.,M.A.P

BAB 3

KEMISKINAN, KETIMPANGAN, DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGANNYA

Micha Snoverson Ratu Rihi, SP., M.Si

Politeknik Pertanian Negeri Kupang

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan dua persoalan fundamental yang tidak pernah absen dari agenda pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang. Keduanya bukan sekadar fenomena statistik yang tercermin dalam angka-angka garis kemiskinan atau koefisien Gini, melainkan merupakan realitas hidup jutaan manusia yang terjebak dalam kondisi kekurangan akses terhadap pangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang layak. Isu kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan jantung dari kajian ekonomi pembangunan, karena keduanya secara langsung menentukan kualitas hidup sebagian besar penduduk di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (Todaro & Smith, 2020). Dengan menempatkan kedua isu ini sebagai titik sentral analisis, ekonomi pembangunan tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan agregat, tetapi juga tentang siapa yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut dan seberapa merata manfaatnya terdistribusi.

Urgensi kajian ini semakin kuat ketika dihadapkan pada kenyataan empiris yang ada di Indonesia. Meskipun kemiskinan di

Indonesia menurun cukup cepat seiring akselerasi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan justru meningkat secara signifikan selama seperempat abad terakhir, sehingga kemiskinan menjadi semakin tidak responsif terhadap pertumbuhan (Hill, 2021). Temuan ini mengungkapkan sebuah paradoks pembangunan yang penting: pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dengan sendirinya menjamin pengurangan kemiskinan dan ketimpangan secara proporsional. Sebaliknya, tanpa kebijakan yang tepat dan terarah, pertumbuhan justru dapat memperlebar jurang kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, dan antara wilayah yang maju dan yang tertinggal.

Dimensi multidimensi dari kemiskinan juga memperkuat urgensi kajian ini. Kemiskinan tidak semata-mata soal rendahnya pendapatan atau konsumsi, tetapi mencakup deprivasi dalam berbagai aspek kehidupan secara bersamaan. Kemiskinan dipandang sebagai kumpulan kekurangan di berbagai dimensi seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak, sehingga pengukuran kemiskinan multidimensi memberikan gambaran yang jauh lebih komprehensif dibandingkan pendekatan moneter semata (Alkire et al., 2015). Perspektif ini membuka ruang analisis yang lebih dalam tentang mengapa seseorang tetap miskin meskipun secara nominal telah melewati garis kemiskinan, dan mengapa kebijakan yang berfokus hanya pada transfer pendapatan sering kali tidak cukup untuk memutus lingkaran kemiskinan secara struktural.

Dari sisi pengukuran, perbedaan metodologi antara lembaga-lembaga internasional dan nasional juga menunjukkan betapa kompleksnya persoalan ini dalam praktik kebijakan. Tingkat kemiskinan nasional Indonesia tercatat sebesar 8,57 persen pada September 2024 (BPS, 2025), sementara Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan berbasis Purchasing Power Parity (PPP) untuk negara berpendapatan menengah atas dan memperoleh angka yang

jauh lebih tinggi. Perbedaan ini bukan berarti kontradiksi, melainkan cerminan dari perbedaan tujuan pengukuran antara kepentingan kebijakan domestik dan perbandingan antarnegara secara global (World Bank, 2024). Perbedaan metodologi tersebut menggarisbawahi pentingnya pemahaman konseptual yang mendalam sebelum merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif dan tepat sasaran.

Bertolak dari latar belakang tersebut, bab ini disusun dengan tujuan memberikan kajian yang komprehensif dan sistematis tentang kemiskinan, ketimpangan, dan kebijakan penanggulangannya, khususnya dalam konteks Indonesia sebagai salah satu negara berkembang terbesar di dunia. Pembahasan dibuka dengan menelaah konsep dan cara pengukuran kemiskinan dari berbagai perspektif (Subbab 3.B), dilanjutkan dengan analisis atas penyebab struktural dan perangkat kemiskinan (Subbab 3.C), kemudian mengkaji konsep dan dinamika ketimpangan beserta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi (Subbab 3.D). Selanjutnya, bab ini menyajikan profil empiris kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia (Subbab 3.E), menganalisis kebijakan dan program penanggulangan yang telah diterapkan beserta evaluasinya (Subbab 3.F), dan diakhiri dengan diskusi tentang arah kebijakan ke depan (Subbab 3.G) serta penutup (Subbab 3.H). Keseluruhan alur pembahasan ini dirancang agar pembaca memperoleh pemahaman yang utuh — dari fondasi konseptual hingga implikasi kebijakan praktis — dalam rangka berkontribusi pada upaya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pemahaman mendalam atas konsep dan definisi kemiskinan, yang menjadi titik berangkat analisis ini, akan dibahas secara rinci pada subbab berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiken, E., Bellue, S., Karlan, D., Udry, C. R., & Blumenstock, J. (2022). Machine learning and phone data can improve targeting of humanitarian aid. *Nature*, 603(7903), 864–870. <https://doi.org/10.1038/s41586-022-04484-9>
- Akita, T., & Alisjahbana, A. S. (2023). The initial impacts of the COVID-19 pandemic on regional economies in Indonesia: Structural changes and regional income inequality. *Sustainability*, 15(18), 13709. <https://doi.org/10.3390/su151813709>
- Alkire, S., Foster, J. E., Seth, S., Santos, M. E., Roche, J. M., & Ballon, P. (2015). *Multidimensional poverty measurement and analysis*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199689491.001.0001>
- Alkire, S., Kanagaratnam, U., & Suppa, N. (2024). *The global multidimensional poverty index (MPI) 2024: Country results and methodological note* (OPHI MPI Methodological Note 59). Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford. <https://ophi.org.uk/global-mpi/2024>
- Amponsah, M., Agbola, F. W., & Mahmood, A. (2023). The relationship between poverty, income inequality and inclusive growth in Sub-Saharan Africa. *Social Indicators Research*, 166(1), 101–127. <https://doi.org/10.1007/s11205-022-02978-7>
- Andersen, A. L. (2025). *Poverty reduction and digitalization in Indonesia*. *Asian Journal of Economic Modelling*, 13(3), 419–436. <https://archive.aessweb.com/index.php/5009/article/download/5577/8415>
- Androff, D., & Abbas, J. (2023). Social welfare policy and programs in Indonesia. *Journal of Policy Practice and Research*, 4(2), 101–118. <https://doi.org/10.1007/s42972-023-00078-5>

- Ashwin, P. (2025). *Growth, inequality, and poverty reduction in Indonesia*. Asian Institute of Management. [https://aei.um.edu.my/docs/2025/dili/Ashwin%20-%20Poverty%20And%20Inequaity%20\(Final1\).pdf](https://aei.um.edu.my/docs/2025/dili/Ashwin%20-%20Poverty%20And%20Inequaity%20(Final1).pdf)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2023). *SDGs adalah pokok penting acuan mencapai Indonesia Emas 2045*. Sekretariat Nasional SDGs Indonesia. <https://sdgs.bappenas.go.id/sdgs-adalah-pokok-penting-acuan-mencapai-indonesia-emas-2045/>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Hasil sensus pertanian 2023: Pendataan lengkap sensus pertanian*. BPS RI. <https://st2023.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indonesia poverty profile in March 2023*. <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2023/07/17/2016/indonesia-poverty-profile-in-march-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *In March 2024, the poor population percentage decreased into 9.03 percent*. <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2024/07/01/2370/in-march-2024--the-poor-population-percentage-decreased-into-9-03-percent-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025, Januari 15). *Gini ratio September 2024 tercatat sebesar 0,381*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2399/gini-ratio-september-2024-tercatat-sebesar-0-381.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025, Mei 2). *Understanding the differences in poverty rates reported by the World Bank and Statistics Indonesia (BPS)*. <https://www.bps.go.id/en/news/2025/05/02/702/understanding-the-differences-in-poverty-rates-reported-by-the-world-bank-and-statistics-indonesia--bps-.html>
- Bandiera, O., Burgess, R., Heil, A., & Sulaiman, M. (2025). *Poverty traps* (STICERD Economic Organisation and Public Policy

- Discussion Paper No. 75). London School of Economics.
<https://sticerd.lse.ac.uk/dps/eopp/eopp75.pdf>
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). *Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty*. PublicAffairs.
- Barrett, C. B., & Carter, M. R. (2013). The economics of poverty traps and persistent poverty: Empirical and policy implications. *Journal of Development Studies*, 49(7), 976–990.
<https://doi.org/10.1080/00220388.2013.785519>
- Bazzi, S., Sumarto, S., & Suryahadi, A. (2014). *Finding the poor vs. measuring their poverty: Exploring the drivers of targeting effectiveness in Indonesia*. MPRA Paper No. 59759.
<https://mpra.ub.uni-muenchen.de/59759/>
- Dartanto, T., & Otsubo, S. T. (2021). Poverty dynamics in Indonesia: Empirical evidence from three main approaches. *World Development Perspectives*, 23, 100344.
<https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100344>
- Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. (2025). *Beyond statistics: Establishing a poverty line that reflects true hardship*.
<https://feb.ugm.ac.id/en/faculty-insight/13513-beyond-statistics-establishing-a-poverty-line-that-reflects-true-hardship>
- Falcão, I. R., Ribeiro-Silva, R. C., Alves, F. J. O., Ortelan, N., Silva, N. J., Fiaccone, R. L., & Barreto, M. L. (2022). Evaluating the effect of Bolsa Família, Brazil's conditional cash transfer programme, on maternal and child health: A study protocol. *PLOS ONE*, 17(5), e0268500. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268500>
- Fitriyani, C., Rusiti, Septiavin, Q., & Sari, E. R. (2023). Analisis determinan ketimpangan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. *Bappenas Working Papers*, 7(3), 1–20.
<https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/download/354/149>

- Fragoso, K. P. (2025). Poverty as capability deprivation: Considering the relational approach, group-based analysis, and socio-structural lens. *European Journal of Social Theory*. <https://doi.org/10.1177/13684310241270471>
- Fufa, G. B. (2021). Determinants of pro-poor growth and its impacts on income share: Evidence from Ethiopian time series data. *Journal of Mathematics*, 2021, 6645789. <https://doi.org/10.1155/2021/6645789>
- Hashim, S., Yusof, S. A., & Isa, M. S. (2016). Vicious circle of poverty: A literature review. *Advances in Natural and Applied Sciences*, 10(3), 1–6.
- Hill, H. (2021). What's happened to poverty and inequality in Indonesia over half a century? *Asian Development Review*, 38(1), 68–97. https://doi.org/10.1162/adev_a_00158
- Hudang, A. K., Hariyanto, T., & Handoyo, R. D. (2024). Does conditional cash transfer deliver? The Indonesian evidence on PKH. *Business: Theory and Practice*, 25(2), 447–457. <https://doi.org/10.3846/btp.2024.13865>
- Hutabarat, R., Sitopu, J. B., & Halomoan, N. (2023). Analysis of poverty headcount, poverty gap, and poverty severity in Indonesia. *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities*, 2(1), 8–14.
- J-PAL (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab). (2019). *The medium-term impact of conditional cash transfers on health and education in Indonesia*. <https://www.povertyactionlab.org/evaluation/medium-term-impact-conditional-cash-transfers-health-and-education-indonesia>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024*.

- Kementerian Keuangan RI.
<https://www.kemenkeu.go.id/media/26405/nk-apbn-2024.pdf>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2024). *Rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025–2045*. Bappenas. <https://www.bappenas.go.id/id/rencana-pembangunan/rpjpn-2025-2045/>
- Kraay, A., & McKenzie, D. (2014). *Do poverty traps exist? Assessing the evidence* (Policy Research Working Paper No. 6835). World Bank.
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/915281468330944384/pdf/WPS6835.pdf>
- Kuntjorowati, E., Andari, S., Prayoga, R. A., Yusuf, H., Soegiharto, S., Fatimah, S., Listyawati, A., Yuniarti, L., & Hakim, F. N. (2024). Effectiveness of strengthening social protection and security programs in alleviating poverty in rural areas through multi-sector partnerships. *Heliyon*, 10(22), e40485.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40485>
- Kurniasari, M., & Oktavilia, S. (2023). Determinants of poverty in Western Indonesia and Eastern Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 12(1), 1–15.
<https://doi.org/10.15294/edaj.v12i1.61513>
- Kuźmar, S. (2023). Income inequality and economic growth: The reexamination of the existence of Kuznets curve: Evidence from CEE countries. *Ekonomia i Prawo. Economics and Law*, 22(2), 237–250. <https://doi.org/10.12775/EiP.2023.014>
- Massagony, L., Harahap, R., & Kurniawan, T. (2025). Integrating big data for targeted energy subsidy reform: Evidence from Indonesia. *Journal of Cleaner Production*, 445, 141903.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.141903>
- Maulana, I., Purnomo, E. P., Kasiwi, A. N., & Rahman, T. (2026). Indonesia's Program Keluarga Harapan (2007–2024): Social

- investment aspirations, political instrumentalisation, and contested developmental outcomes. *Cogent Social Sciences*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2026.2663682>
- Mihaylova, S., Bratoeva-Manoleva, S., & Peneva, M. (2025). Measuring inclusive growth in developing countries: Composite index approach and sectoral transformation analysis. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(6), 336. <https://doi.org/10.3390/jrfm18060336>
- Nasution, A., Siregar, H., & Juanda, B. (2025). Spatial agglomeration and regional disparities: A comparative analysis based on the interregional input-output model. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(1), 1–14. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.201110>
- Nurkse, R. (1953). *Problems of capital formation in underdeveloped countries*. Oxford University Press.
- Omar, M. A., & Inaba, K. (2020). Does financial inclusion reduce poverty and income inequality in developing countries? A panel data analysis. *Journal of Economic Structures*, 9(1), 37. <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00214-4>
- Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). (2024). *Global MPI 2024: Global poverty amid conflict*. OPHI & UNDP. <https://ophi.org.uk/global-mpi/2024>
- Pakpahan, Y. M., Rahayu, S. E., & Hidayat, T. (2025). The role of financial inclusion in reducing household poverty: Insights from Eastern Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.xxxx/jerps.2025.2385>
- Putri, A. M., & Sarungu, J. J. (2025). Gendered dimensions of poverty in Indonesia: A study of financial inclusion and the influence of female-headed households. *Economies*, 13(8), 240. <https://doi.org/10.3390/economies13080240>

- Rammohan, A., & Tohari, A. (2023). Rural poverty and labour force participation: Evidence from Indonesia's Village Fund Program. *PLOS ONE*, 18(6), e0283041. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283041>
- Sjaf, S., Sampean, S., Fauzi, A., & Ekayani, M. (2025). Analysis of spatial inequality and rural development in the supporting region for Nusantara capital city, Indonesia. *City and Environment Interactions*, 25, 100215. <https://doi.org/10.1016/j.cacint.2025.100215>
- Soares, F. V., Soares, S., Medeiros, M., & Osório, R. G. (2010). *Evaluating the impact of Brazil's Bolsa Família: Cash transfer programs in comparative perspective*. Latin American Research Review. <https://doi.org/10.1017/S0023879100000236>
- Subandi, A., Sari, D. W., & Hanum, B. (2023). The effects of the Indonesian conditional cash transfer program on transition out of agriculture. *World Development*, 172, 106388. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106388>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Yumna, A. (2021). The impact of COVID-19 and social protection programs on poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(3), 267–296. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1960846>
- The Prakarsa. (2023). *Multidimensional poverty index (IKM)*. <https://theprakarsa.org/en/ikm/>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson. <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/economic-development/P200000005609/9781292453323>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2024). *SDG Goal 1: No poverty — progress and challenges*. <https://sdgs.un.org/goals/goal1>

- United Nations. (2024). *The sustainable development goals report 2024*. United Nations. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2024/>
- Vo, D. H., Vo, A. T., & Ho, C. M. (2024). The short- and long-run effect of human capital on income inequality: Empirical evidence in the ASEAN region. *PLOS ONE*, 19(7), e0304678. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0304678>
- Wahyu, R., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2024). Analysis of regional disparities in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 10(2), 1–18. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol10.iss2.2024.1954>
- Wardhana, D., Ihle, R., Heijman, W., & Ratering, T. (2025). Enhancing poverty targeting with spatial machine learning: An application to Indonesia. *arXiv preprint arXiv:2503.04300*. <https://arxiv.org/abs/2503.04300>
- World Bank. (2024). *Poverty & equity brief: Indonesia*. World Bank Group. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099124001062512710/pdf/IDU1bc79f79214c1314c0d19a351de1a45668677.pdf>
- World Bank. (2025). *June 2025 update to global poverty lines*. <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2025/06/05/june-2025-update-to-global-poverty-lines>
- World Bank. (2025). *The World Bank's updated global poverty lines: Indonesia*. <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2025/06/13/updated-global-poverty-lines-indonesia>

PROFIL PENULIS



Micha Snoverson Ratu Rii, SP., M.Si

Penulis merupakan dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pertanian, Ekonomi Produksi, Kebijakan Perdagangan Pertanian, Kewirausahaan Hortikultura, Manajemen Usahatani, Pengantar Ilmu Pertanian, dan Pemasaran Produk Hortikultura pada Program Studi Teknologi Industri Hortikultura dan Program Studi Tanaman Pangan dan Hortikultura Jenjang Diploma-IV, Jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Politeknik Pertanian Negeri Kupang sejak tahun 2002. Pendidikan S1 diperoleh dari Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana (2000) dan pendidikan S2 diraih dari Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN) Institut Pertanian Bogor (IPB) (2013). Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya, penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Penulis adalah salah satu Pengajar Pendamping Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (2025). Penulis telah menulis sebanyak 25 buku referensi dan *book chapter* sejak 2007. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan ilmiah yaitu pada seminar nasional dan internasional.

Email: raturihimicha@gmail.com

BAB 4

MODAL MANUSIA, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DALAM PEMBANGUNAN

Dr. Muhammad Ihsan Said Ahmad, SE., M.Si

Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Pembangunan pada awalnya banyak dipahami sebagai proses peningkatan kapasitas ekonomi yang keberhasilannya terutama diukur melalui pertumbuhan produk domestik bruto, peningkatan pendapatan per kapita, akumulasi modal, dan perluasan produksi. Perspektif tersebut menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama dengan asumsi bahwa peningkatan output pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu secara otomatis menghasilkan perbaikan kualitas hidup, pemerataan kesempatan, maupun pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Kritik terhadap pendekatan yang terlalu berorientasi pada pendapatan kemudian mendorong berkembangnya paradigma pembangunan yang lebih luas, yaitu pembangunan yang menempatkan manusia dan kualitas kehidupannya sebagai tujuan sekaligus instrumen pembangunan. *Human Development Report* pertama menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan, tetapi dengan perluasan pilihan manusia untuk hidup sehat, memperoleh

pendidikan, dan mencapai standar kehidupan yang layak (United Nations Development Programme [UNDP], 1990).

Perubahan paradigma tersebut membawa konsekuensi penting bagi ekonomi pembangunan dan perencanaan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tetap diperlukan, tetapi dipandang sebagai sarana untuk memperluas kapabilitas dan kesejahteraan manusia, bukan sebagai tujuan akhir pembangunan. Pendekatan pembangunan manusia memusatkan perhatian pada kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai, memperoleh kesempatan, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya (Sen, 1999; UNDP, 2025). Dengan demikian, manusia memiliki posisi ganda dalam pembangunan. Di satu sisi, manusia merupakan subjek pembangunan yang kesejahteraan, kebebasan, dan kualitas kehidupannya menjadi tujuan pembangunan. Di sisi lain, manusia merupakan modal strategis pembangunan karena pengetahuan, keterampilan, kesehatan, kreativitas, dan kemampuan adaptasinya menentukan kapasitas suatu perekonomian untuk menghasilkan nilai tambah dan melakukan transformasi struktural.

Dalam perspektif ekonomi, kualitas manusia tersebut dikonsepsikan sebagai modal manusia (*human capital*). Schultz (1961) dan Becker (1964) mengembangkan pemikiran bahwa pengetahuan, keterampilan, pendidikan, kesehatan, dan kapasitas produktif yang melekat pada individu dapat dipandang sebagai bentuk modal karena dapat ditingkatkan melalui investasi dan menghasilkan manfaat ekonomi pada masa mendatang. Investasi pada manusia memungkinkan pekerja menjadi lebih produktif, lebih mampu mengadopsi teknologi, lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan kerja, serta memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menciptakan inovasi. Oleh karena itu, keunggulan pembangunan suatu negara semakin ditentukan bukan hanya oleh ketersediaan sumber daya alam

dan modal fisik, tetapi juga oleh kemampuan negara tersebut dalam membangun, memanfaatkan, dan mempertahankan modal manusia berkualitas.

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua investasi fundamental dalam proses tersebut. Pendidikan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan berpikir, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara produktif dalam perekonomian, sedangkan kesehatan menentukan kemampuan fisik dan mental individu untuk belajar, bekerja, serta memanfaatkan keterampilan yang dimilikinya. Keduanya memiliki hubungan yang saling memperkuat: kondisi kesehatan dan gizi yang baik mendukung kemampuan belajar, sementara pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan literasi kesehatan, keputusan rumah tangga, dan kemampuan mengakses layanan kesehatan. World Bank menempatkan hasil pendidikan dan kesehatan sebagai elemen penting dalam pengukuran modal manusia karena keduanya memengaruhi produktivitas generasi pekerja di masa depan (World Bank, 2026). Dengan perspektif tersebut, belanja pendidikan dan kesehatan tidak semata-mata merupakan pengeluaran sosial, tetapi investasi pembangunan jangka panjang yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial lintas generasi.

Urgensi investasi modal manusia semakin besar ketika perekonomian memasuki era transformasi digital, otomatisasi, kecerdasan artifisial, ekonomi hijau, dan perubahan struktur pekerjaan. Keunggulan berbasis tenaga kerja murah dan sumber daya alam menjadi semakin tidak memadai ketika penciptaan nilai ekonomi bergeser menuju pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi. UNDP (2025) menunjukkan bahwa perkembangan AI kembali menegaskan pentingnya kemampuan dan pilihan manusia dalam menentukan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). Artificial intelligence, automation and work. In A. Agrawal, J. Gans, & A. Goldfarb (Eds.), *The economics of artificial intelligence: An agenda* (pp. 197–236). University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226613475.003.0008>
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.
- Almond, D., & Currie, J. (2011). Killing me softly: The fetal origins hypothesis. *Journal of Economic Perspectives*, 25(3), 153–172. <https://doi.org/10.1257/jep.25.3.153>
- Autor, D. H. (2014). Skills, education, and the rise of earnings inequality among the “other 99 percent.” *Science*, 344(6186), 843–851. <https://doi.org/10.1126/science.1251868>
- Badan Pusat Statistik. (2026a). *Indeks pembangunan manusia 2025*. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026b). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026c). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363*. BPS-Statistics Indonesia.
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. National Bureau of Economic Research.
- Becker, G. S., & Tomes, N. (1986). Human capital and the rise and fall of families. *Journal of Labor Economics*, 4(3, Part 2), S1–S39. <https://doi.org/10.1086/298118>
- Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). *The demographic dividend: A new perspective on the economic consequences of population change*. RAND Corporation. <https://doi.org/10.7249/MR1274>

- Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2004). The effect of health on economic growth: A production function approach. *World Development*, 32(1), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2003.07.002>
- Cunha, F., & Heckman, J. (2007). The technology of skill formation. *American Economic Review*, 97(2), 31–47. <https://doi.org/10.1257/aer.97.2.31>
- Currie, J., & Almond, D. (2011). Human capital development before age five. In D. Card & O. Ashenfelter (Eds.), *Handbook of labor economics* (Vol. 4B, pp. 1315–1486). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S0169-7218\(11\)02413-0](https://doi.org/10.1016/S0169-7218(11)02413-0)
- Cutler, D. M., & Lleras-Muney, A. (2010). Understanding differences in health behaviors by education. *Journal of Health Economics*, 29(1), 1–28. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2009.10.003>
- Dorn, D., Schoner, F., Seebacher, M., Simon, L., & Woessmann, L. (2024). *Multidimensional skills as a measure of human capital: Evidence from LinkedIn profiles* [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.18638>
- Grossman, M. (1972). On the concept of health capital and the demand for health. *Journal of Political Economy*, 80(2), 223–255. <https://doi.org/10.1086/259880>
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). Education, knowledge capital, and economic growth. In S. Bradley & C. Green (Eds.), *The economics of education* (2nd ed., pp. 171–182). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815391-8.00014-8>
- Heckman, J. J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. *Science*, 312(5782), 1900–1902. <https://doi.org/10.1126/science.1128898>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025a). *Profil kesehatan Indonesia 2024*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025b). *SSGI 2024: Prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8 persen*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). *Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025–2045*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025–2029*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Lucas, R. E., Jr. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90168-7](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7)
- Mincer, J. (1974). *Schooling, experience, and earnings*. National Bureau of Economic Research.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Do adults have the skills they need to thrive in a changing world? Survey of Adult Skills 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/b263dc5d-en>
- Pritchett, L. (2001). Where has all the education gone? *The World Bank Economic Review*, 15(3), 367–391. <https://doi.org/10.1093/wber/15.3.367>
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education: A decennial review of the global literature. *Education Economics*, 26(5), 445–458. <https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426>
- Roemer, J. E. (1998). *Equality of opportunity*. Harvard University Press.

- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), S71–S102. <https://doi.org/10.1086/261725>
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. <https://doi.org/10.2307/1882010>
- United Nations Development Programme. (1990). *Human development report 1990: Concept and measurement of human development*. Oxford University Press.
- United Nations Development Programme. (2025). *Human development report 2025: A matter of choice: People and possibilities in the age of AI*. United Nations Development Programme.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2024). *Global education monitoring report 2024/5: Leadership in education —Lead for learning*. UNESCO.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2026). *World inequality database on education*. UNESCO.
- World Bank. (2024a). *Learning poverty*. World Bank.
- World Bank. (2024b). *The changing wealth of nations*. World Bank.
- World Bank. (2026a). *Building human capital where it matters: Homes, neighborhoods, and workplaces*. World Bank.
- World Bank. (2026b). *Human Capital Index Plus (HCI+): Methodology*. World Bank.
- World Bank. (2026c). *Human Capital Index Plus: Indonesia country brief*. World Bank.

World Health Organization, United Nations Children's Fund, & World Bank. (2025). *Levels and trends in child malnutrition: UNICEF/WHO/World Bank Group joint child malnutrition estimates—Key findings of the 2025 edition*. World Health Organization.

World Health Organization. (2024). *Malnutrition*. World Health Organization.

PROFIL PENULIS



Dr. Muh. Ihsan Said Ahmad, SE., M.Si.

Lahir di Ujungpandang, 9 Juli 1973. Lulus S1 dengan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Manajemen Universitas Hasanuddin tahun 1998, kemudian melanjutkan studi S2 pada Program Studi Ekonomi Sumberdaya di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan lulus dengan gelar Magister Sains (M.Si.) tahun 2006. Pada tahun 2019 mendapatkan gelar Doktor (Dr.) sebagai lulusan S3 pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Sekarang ini merupakan Dosen Tetap di Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Memiliki kepakaran di bidang Pendidikan Ekonomi khususnya Literasi Kewirausahaan dan UMKM, Manajemen Bisnis, serta Ekonomi Sumberdaya. Untuk mewujudkan karirnya sebagai dosen profesional, selain aktif mengajar pada matakuliah; Pengantar Bisnis, Kewirausahaan, UMKM, Manajemen SD Manusia, Manajemen Pemasaran, Manajemen Strategi, dan Ekonomi Sumberdaya, juga aktif sebagai peneliti dan pengabdian di bidang kepakarannya tersebut, termasuk menulis berbagai artikel ilmiah, beberapa buku ajar dan *book chapter* dengan harapan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara di bidang pendidikan.

E-mail : m.ihsansaid@unm.ac.id

BAB 5

PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN INDUSTRI: TANTANGAN DAN STRATEGI

Viona Nainggolan, S.P., M.Si

Politeknik Pertanian Negeri Kupang

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan multidimensional yang tidak hanya ditandai oleh peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga oleh perubahan struktur ekonomi, peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pendapatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara berkembang, pembangunan ekonomi pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan dan menikmati nilai ekonomi secara berkelanjutan.

Pertanian dan industri merupakan dua sektor yang memiliki posisi strategis dalam proses tersebut. Pertanian menyediakan pangan dan bahan baku bagi berbagai aktivitas ekonomi, sedangkan industri menghasilkan input pertanian sekaligus mengolah hasil pertanian menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pembangunan pertanian dan industri seharusnya tidak dipandang sebagai dua agenda pembangunan yang terpisah. Indonesia memiliki basis pertanian yang besar. Hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 29,34 juta usaha pertanian perorangan. Pada

saat yang sama, struktur usaha pertanian masih didominasi usaha berskala kecil. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi proses transformasi pertanian menuju sistem agribisnis yang lebih produktif dan berorientasi pasar.

Pertanian juga mempunyai keterkaitan erat dengan sektor industri. Industri pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, teknologi, kemasan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi menyediakan berbagai kebutuhan bagi kegiatan pertanian. Sebaliknya, pertanian menyediakan bahan baku bagi industri pangan, minuman, kosmetik, bioenergi, farmasi, dan berbagai industri lainnya. Dengan demikian, pembangunan pertanian tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana produksi tersebut menghasilkan nilai tambah, pendapatan, efisiensi, daya saing, dan kesejahteraan.

Temuan penelitian Ratu Rihi et al. (2026) di Kabupaten Kupang memperlihatkan bahwa produktivitas usahatani padi berkaitan dengan faktor sosial-ekonomi petani, akses kelembagaan, dan penggunaan input produksi. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan SEM-PLS untuk menganalisis hubungan antara karakteristik sosial-ekonomi, akses kelembagaan, penggunaan input, dan produktivitas usahatani. Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tidak dapat hanya mengandalkan bantuan input. Produktivitas juga memerlukan kelembagaan, akses informasi, kapasitas petani, dan lingkungan ekonomi yang mendukung.

Pada sisi hilir, permasalahan pemasaran juga menjadi tantangan. Penelitian Itu Nu et al. (2025) mengenai pemasaran terung di pasar-pasar tradisional Kota Kupang menunjukkan pentingnya saluran pemasaran, fungsi pemasaran, margin, dan efisiensi dalam menentukan kinerja rantai pemasaran produk hortikultura. Dengan

demikian, pembangunan pertanian harus dilihat sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

B. KONSEP DAN HAKIKAT PEMBANGUNAN PERTANIAN

1. Pengertian Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian merupakan proses transformasi sistem pertanian untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, pendapatan, kesejahteraan masyarakat pertanian, serta keberlanjutan sumber daya alam. Pembangunan pertanian tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi komoditas, tetapi juga mencakup perubahan teknologi, kelembagaan, sumber daya manusia, pasar, infrastruktur, pembiayaan, serta hubungan antara petani dan pelaku ekonomi lainnya.

Penting untuk membedakan antara pertumbuhan pertanian dan pembangunan pertanian. Pertumbuhan pertanian terutama menunjukkan peningkatan output atau nilai tambah sektor pertanian. Sementara itu, pembangunan pertanian mempunyai cakupan yang lebih luas, termasuk peningkatan kesejahteraan petani, pemerataan akses terhadap sumber daya produktif, pengurangan kemiskinan, penguatan kelembagaan, peningkatan daya saing, serta keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, peningkatan produksi padi, jagung, sayuran atau buah-buahan belum dapat secara otomatis disebut sebagai pembangunan pertanian apabila peningkatan produksi tersebut tidak diikuti peningkatan pendapatan petani, efisiensi usaha, akses pasar, dan keberlanjutan sumber daya.

2. Tujuan Pembangunan Pertanian

Secara umum, pembangunan pertanian memiliki beberapa tujuan utama:

- a. Meningkatkan produktivitas pertanian;
- b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani;

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023 tahap I*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Produk domestik bruto Indonesia menurut lapangan usaha*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Luas panen dan produksi padi di Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik.
- Chrisendo, D. (2021). Oil palm and structural transformation of agriculture in Indonesia. *Agricultural Economics*.
- Itu Nu, M. V., Ratu Rihi, M. S., Walunguru, L., Namah, C. N., Sine, H. M. C., Nainggolan, V., Koylal, J. A., Abdullah, Y., Saubaki, M. Y., Fallo, F. A. I., Nababan, M. B., & Adjam, R. M. O. (2025). Analisis efisiensi pemasaran terung di pasar-pasar tradisional Kota Kupang. *Jurnal Partner*, 30(2), 220–234. <https://doi.org/10.35726/jp.v30i2.7511>.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2024). *Making Indonesia 4.0: Langkah Indonesia menuju era digital dan otomatisasi*. Kementerian Perindustrian.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2024). *Statistik pertanian 2024*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2025). *Statistik hortikultura 2024*. Direktorat Jenderal Hortikultura.

- Morley, S., Kennedy, A., Pradesha, A., & Hadiwidjaja, G. (2020). *The role of agriculture in the structural transformation of Indonesia*. International Food Policy Research Institute.
- Nainggolan, V. F. N., Lubis, P. D., & Purnaningsih, N. (2019). *Perilaku komunikasi dan keberlanjutan usahatani pinang Provinsi Jambi*. Institut Pertanian Bogor. [Tesis—digunakan sebagai referensi pendukung, bukan jurnal].
- Nainggolan, V., Ratu Rihi, M. S., & Nainggolan, S. (2025). Analisis determinan efisiensi teknis usahatani bawang merah di Kabupaten Kupang menggunakan model *stochastic frontier*. *Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian*, 8.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*.
- Ratu Rihi, M. S., Nainggolan, V. F. N., Marjaya, S., Sangadji, H. M., & Nababan, M. B. (2024). Marketing efficiency of seaweed in Sabu Raijua Regency: (Case study Raijua District). *Politeknik Negeri Pontianak Conference Series*, 1(1), 57–88.
- Ratu Rihi, M. S., Nainggolan, V., Elim, R. V., & Nainggolan, S. (2026). Socio-economic pathways to rice farming productivity: Evidence from institutional and input-based mediation in Kupang Regency. *Randwick International of Social Science Journal*, 7(1), 48–59. <https://doi.org/10.47175/rissj.v7i1.1269>.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- World Bank. (2026). *Indonesia economic prospects: Managing risks, unlocking productivity*. World Bank.
- Yusuf, A. A. (2021). The impact of Industry 4.0 on the Indonesian economy: A general equilibrium assessment. *Regional Science Policy & Practice*, 13(6), 1805–1824.

PROFIL PENULIS



Viona Nainggolan, S.P., M.Si

lahir di Jambi pada tanggal 04 Desember 1993. Pendidikan tinggi penulis dimulai pada tahun 2011 dengan menempuh studi Strata Satu (S1) di Universitas Jambi pada Program Studi Agribisnis Pertanian. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister (S2) pada tahun 2017 di Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan konsentrasi pada Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Karier akademik penulis dimulai pada tahun 2022 sebagai dosen di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Dalam perannya sebagai tenaga pendidik, penulis mengampu beberapa mata kuliah di bidang ilmu sosial ekonomi pertanian, di antaranya Dasar-dasar Manajemen, Etika Bisnis, Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian, Pemasaran Pertanian, Kewirausahaan Hortikultura, serta Ekonomi Pertanian. Sebagai seorang akademisi, penulis aktif dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga secara konsisten mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesional di bidang pengajaran dan pengembangan keilmuan. Selain itu, penulis berperan aktif dalam mendampingi mahasiswa dalam berbagai ajang perlombaan baik di tingkat nasional maupun internasional sebagai bentuk komitmen dalam membina dan mengembangkan potensi mahasiswa. Dalam bidang kepenulisan akademik, penulis telah menulis dan menerbitkan beberapa karya ilmiah, termasuk buku berjudul Ekonomi Ketenagakerjaan, Strategi Pemasaran Pertanian di Era Digital, Manajemen Perkebunan Hortikultura, Etika Bisnis, Studi Kelayakan Agribisnis, Harmoni Masyarakat Multikultural Teori dan

Implementasi dalam Kontek Indonesia, Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan.

Email: viona.febrina@gmail.com

BAB 6

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN: UTANG LUAR NEGERI DAN KEBIJAKAN FISKAL

Sri Wahyunawati, S.Hut, MM

STIE Dahani Dahanai

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan negara menyediakan sumber pembiayaan yang memadai, berkelanjutan, dan dikelola secara akuntabel. Oleh karena itu, pembiayaan pembangunan menjadi salah satu pilar utama kebijakan ekonomi karena menentukan kapasitas pemerintah dalam menyediakan barang publik, meningkatkan daya saing nasional, dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu pembiayaan pembangunan semakin memperoleh perhatian seiring meningkatnya kebutuhan belanja negara. Transformasi ekonomi menuju negara berpendapatan tinggi, pembangunan infrastruktur strategis, penguatan ketahanan pangan dan energi, percepatan hilirisasi industri, digitalisasi ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta komitmen

terhadap pembangunan rendah karbon menuntut dukungan anggaran yang semakin besar. Di sisi lain, kemampuan penerimaan negara belum selalu meningkat secepat kebutuhan pembiayaan tersebut. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk mengoptimalkan seluruh instrumen pembiayaan, baik yang berasal dari penerimaan domestik maupun dari pembiayaan melalui utang.

Setelah berhasil menjaga stabilitas ekonomi pascapandemi, pemerintah dihadapkan pada tantangan baru berupa perlambatan ekonomi global, tingginya suku bunga internasional, ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas nasional. Situasi tersebut mengharuskan pemerintah menjaga keseimbangan antara upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara dengan komitmen mempertahankan disiplin fiskal agar kepercayaan investor dan stabilitas makroekonomi tetap terpelihara.

Salah satu instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan adalah utang luar negeri. Dalam perspektif ekonomi pembangunan modern, utang luar negeri tidak lagi dipandang semata-mata sebagai beban keuangan negara, melainkan sebagai sumber pembiayaan yang dapat mempercepat pembangunan apabila dimanfaatkan secara produktif. Pembiayaan melalui pinjaman luar negeri memungkinkan pemerintah memperoleh tambahan ruang fiskal untuk membangun infrastruktur, memperluas investasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, dan mempercepat transformasi ekonomi. Namun demikian, manfaat tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pengelolaannya dilakukan secara hati-hati (*prudent*), transparan, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi nasional.

Di sisi lain, penggunaan utang luar negeri juga membawa konsekuensi fiskal yang tidak dapat diabaikan. Kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang akan memengaruhi struktur

pengeluaran pemerintah pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, perubahan suku bunga global, pelemahan nilai tukar rupiah, maupun gejolak pasar keuangan internasional dapat meningkatkan biaya pengelolaan utang. Oleh sebab itu, keputusan pemerintah untuk menambah pembiayaan melalui utang harus selalu mempertimbangkan kemampuan fiskal jangka panjang serta kapasitas perekonomian dalam menghasilkan pertumbuhan yang mampu menopang pembayaran kembali utang tersebut.

Hubungan antara utang luar negeri dan kebijakan fiskal menjadi semakin erat ketika pemerintah menjalankan kebijakan anggaran yang bersifat ekspansif. Defisit anggaran yang muncul akibat besarnya belanja dibandingkan penerimaan negara harus dibiayai melalui berbagai sumber, salah satunya adalah penerbitan surat utang dan pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, kualitas kebijakan fiskal akan sangat menentukan besarnya kebutuhan pembiayaan, sementara struktur utang yang terbentuk akan memengaruhi ruang fiskal pemerintah pada masa mendatang melalui meningkatnya kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang.

Realitas fiskal Indonesia pada periode 2024–2026 menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan fiskal. Meskipun kebutuhan belanja negara terus meningkat untuk mendukung berbagai program prioritas, pemerintah tetap mempertahankan target defisit APBN di bawah batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam rancangan kebijakan fiskal 2026, defisit anggaran diproyeksikan berada pada kisaran sekitar 2,7 persen PDB dengan kebijakan pembiayaan yang tetap mengutamakan kehati-hatian, menjaga rasio utang pada tingkat yang aman, serta meningkatkan porsi pembiayaan domestik guna mengurangi risiko eksternal. Strategi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk



Gambar 5. 2. Hubungan Utang Luar Negeri dan Kebijakan Fiskal

4. Ilustrasi Kondisi Indonesia 2024-2026

Hubungan antara utang luar negeri dan kebijakan fiskal dapat dilihat secara nyata pada strategi pembiayaan pembangunan Indonesia dalam periode 2024-2026. Pemerintah menghadapi kebutuhan investasi yang besar untuk mendukung agenda transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045, termasuk pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, serta transisi energi. Di sisi lain, pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit anggaran di bawah batas 3 persen dari PDB serta mengelola rasio utang pada tingkat yang terkendali. Strategi tersebut menunjukkan bahwa utang digunakan sebagai instrumen pendukung pembangunan, bukan sebagai sumber utama pembiayaan.

Sebagai ilustrasi, ketika pemerintah meningkatkan belanja pada proyek-proyek strategis nasional yang memiliki manfaat jangka panjang, kebutuhan pembiayaan juga meningkat. Namun, kebutuhan tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi melalui utang luar negeri. Pemerintah menerapkan strategi pembiayaan yang lebih beragam dengan mengoptimalkan penerimaan perpajakan, memperkuat PNBP, menerbitkan Surat Berharga Negara, memperluas skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), mengembangkan Green Sukuk, serta memanfaatkan pinjaman luar negeri yang berbiaya rendah dan berjangka panjang untuk proyek-proyek prioritas. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma dari *debt-driven financing* menuju *balanced financing*, yaitu pembiayaan pembangunan yang mengombinasikan berbagai sumber dana dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

Perubahan kondisi ekonomi global juga memengaruhi hubungan antara utang luar negeri dan kebijakan fiskal. Kenaikan suku bunga internasional, ketidakpastian geopolitik, dan meningkatnya volatilitas pasar keuangan mendorong pemerintah lebih selektif dalam memilih sumber pembiayaan. Dalam situasi tersebut, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi mengalokasikan anggaran pembangunan, tetapi juga menjaga kredibilitas fiskal agar biaya pinjaman tetap terkendali dan kepercayaan investor tetap terpelihara. Dengan demikian, koordinasi antara kebijakan fiskal, pengelolaan utang, dan kebijakan moneter menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah diberikan, dapat dipahami bahwa utang luar negeri dan kebijakan fiskal memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Kebijakan fiskal menentukan kebutuhan

serta arah pembiayaan pembangunan, sedangkan utang luar negeri menyediakan tambahan sumber daya keuangan ketika kapasitas pembiayaan domestik belum mencukupi. Namun, keberhasilan hubungan tersebut tidak ditentukan oleh besarnya utang yang dimiliki suatu negara, melainkan oleh kemampuan pemerintah mengelola utang secara produktif, menjaga keberlanjutan fiskal, dan mengalokasikan pembiayaan pada sektor-sektor yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi nasional. Dalam konteks Indonesia, hubungan yang seimbang antara utang luar negeri dan kebijakan fiskal menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, memperkuat daya saing ekonomi, serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Chenery, H. B., & Strout, A. M. (1966). *Foreign Assistance and Economic Development*. *American Economic Review*, 56(4), 679–733.
- Drucker, P. F. (2007). *Management: Tasks, Responsibilities, Practices*. HarperBusiness.
- Gruber, J. (2019). *Public Finance and Public Policy* (6th ed.). Worth Publishers.
- International Monetary Fund. (2024). *Fiscal Monitor: Fiscal Policy in an Era of Transformation*.
- John Maynard Keynes. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Macmillan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Strategi Fiskal dan APBN 2026*.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the Public Sector* (4th ed.). W. W. Norton.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (12th ed.). Pearson.

World Bank. (2024). *International Debt Report 2024*.

World Bank. (2024). *World Development Report 2024*.

PROFIL PENULIS



Sri Wahyunawati, S.Hut, MM. Lulus S1 di Program Studi Teknologi Hasil Hutan Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1996. Lulus S2 di Program Magister Manajemen, Magister Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB-IPB) tahun 2006. Saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal STIE Dahani

Dahanai, Buntok Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Pada bidang pengajaran, penulis mengampu mata kuliah Manajemen Strategik, Ekonomi Manajerial, Pengantar Ekonomi Mikro dan Pengantar Ekonomi Makro. Penulis fokus pada bidang keilmuan Ekonomi, Manajemen Strategik dan Bisnis. Beberapa *book chapter* penulis yang telah diterbitkan yaitu Pengantar Bisnis pada bab 3. Etika Bisnis dan Tanggungjawab Sosial Bisnis, Strategi Akuntansi Manajemen Bab 13. Analisis Strategi Kompetitif: Posisi Bersaing, Ekonomi Mikro Bab 6. Elastisitas Permintaan dan Penawaran, Manajemen Bisnis Era Covid 19 Bab 2. Adaptasi Tatanan New Normal. dan Ekonomi Ketenagakerjaan Bab. 4 Determinan Penentuan Penawaran Tenaga Kerja. Email Penulis : wahyunajati@gmail.com

BAB 7

INTEGRASI EKONOMI GLOBAL DAN DAMPAKNYA BAGI NEGARA BERKEMBANG

Prof. Dr. Ir. Saidin Nainggolan, M.Si.

Universitas Jambi

A. PENDAHULUAN

Integrasi ekonomi global merupakan fenomena struktural yang tidak terelakkan dalam perkembangan ekonomi modern. Fenomena ini ditandai oleh meningkatnya keterkaitan antarnegara melalui perdagangan internasional, arus investasi asing langsung (*foreign direct investment*/FDI), serta difusi teknologi lintas batas (Todaro & Smith, 2015). Proses ini semakin menguat seiring dengan liberalisasi perdagangan, kemajuan teknologi informasi, serta intensifikasi kerja sama ekonomi internasional, sehingga membentuk sistem ekonomi global yang saling terhubung dan saling bergantung. Dalam sistem tersebut, negara berkembang tidak lagi berada pada posisi perifer, melainkan menjadi bagian dari jaringan produksi global (*global value chains*) yang memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi domestik (UNCTAD, 2023). Integrasi ekonomi global tidak terjadi dengan sendirinya. Menurut para ahli ekonomi internasional, ada 6 faktor pendorong utama:

1. Kemajuan Teknologi Transportasi dan Komunikasi
Revolusi teknologi membuat jarak dan waktu bukan lagi hambatan. Kontainerisasi, kapal kargo besar, dan pesawat kargo menurunkan biaya angkut 70% sejak 1960-an. Internet, SWIFT, dan satelit membuat transaksi keuangan antar negara dapat dilakukan dalam hitungan detik (Krugman *et al.*, 2018). Friedman (2005) menyebut ini sebagai penyusutan dunia/ *the world is flat*. Teknologi membuat pasar global terhubung secara real time.
2. Liberalisasi Kebijakan Perdagangan dan Investasi
Sejak GATT 1947 dan pembentukan WTO 1995, tarif rata-rata dunia turun dari 40% menjadi <5%. Negara-negara membentuk FTA, RCEP, AFTA untuk menghapus hambatan. Deregulasi penanaman modal asing juga dibuka lebar untuk menarik FDI (Salvatore, 2019). Balassa (1961) menyebut liberalisasi sebagai tahap awal integrasi: Zona Perdagangan Bebas → Uni Pabean → Pasar Bersama.
3. Peran Perusahaan Multinasional / MNC
MNC seperti Unilever, Toyota, Cargill membangun rantai pasok global (*Global Value Chain*). Produksi dipecah: R&D di AS, pabrik di Vietnam, bahan baku dari Indonesia, pasar di Eropa. Ini memaksa integrasi input, output, dan modal antar negara (Dunning, 1988). Teori OLI Dunning menjelaskan MNC akan berinvestasi ke luar negeri jika punya *Ownership, Location, Internalization advantage*.
4. Perbedaan Sumber Daya dan Keunggulan Komparatif
Teori Ricardo & Heckscher-Ohlin: negara akan berdagang karena perbedaan SDA, tenaga kerja, dan teknologi. Indonesia punya lahan dan iklim untuk padi & sawit. Jepang punya teknologi mesin. Perbedaan ini mendorong saling tukar dan integrasi (Viner, 1950).

5. Dorongan dari Lembaga Internasional
IMF, World Bank, WTO, dan G20 mendorong kebijakan keterbukaan melalui pinjaman, bantuan teknis, dan aturan perdagangan. Syarat pinjaman IMF sering berupa deregulasi dan privatisasi. WTO memaksa anggotanya menurunkan tarif dan subsidi (Stiglitz, 2002). Stiglitz, (2002) mengkritisi bahwa globalisasi dipimpin oleh institusi global yang kepentingannya sering pro negara maju.
6. Kebutuhan Modal dan Teknologi Negara Berkembang
Negara berkembang kekurangan tabungan dan teknologi domestik. Satu-satunya cara mengejar pertumbuhan adalah membuka diri terhadap modal, pinjaman, dan teknologi asing. Kebutuhan ini menjadi dorongan internal untuk berintegrasi (World Bank, 2024).

B. KONSEP DASAR INTEGRASI EKONOMI GLOBAL

1. Definisi Integrasi Ekonomi Global

Integrasi ekonomi global merupakan proses meningkatnya keterkaitan ekonomi antarnegara melalui perdagangan internasional, investasi, serta mobilitas faktor produksi dan teknologi. Proses ini mencerminkan semakin terbukanya perekonomian suatu negara terhadap dinamika ekonomi dunia. Menurut Todaro dan Smith (2015), integrasi ekonomi global tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan perdagangan, Sadono (2004) bahwa kebaikan globalisasi adalah; (a) produksi dunia dapat ditingkatkan (b) meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara (c) meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri (d) dapat memperoleh lebih banyak model dan teknologi yang lebih baik (e) menyediakan dana tambahan untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*.
<https://www.bps.go.id>
- Balassa, B. (1961). *The theory of economic integration*. Richard D. Irwin.
- Baldwin, R. (2016). *The great convergence: Information technology and the new globalization*. Harvard University Press.
- Bordo, M. D. (1993). *The Bretton Woods international monetary system: A historical overview*. National Bureau of Economic Research.
- Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O'Donnell, C. J., & Battese, G. E. (2005). *An introduction to efficiency and productivity analysis* (2nd ed.). Springer.
- Dollar, D., & Kraay, A. (2004). Trade, growth, and poverty. *The Economic Journal*, 114(493), F22–F49.
<https://doi.org/10.1111/j.0013-0133.2004.00186.x>
- Eichengreen, B. (1992). *Golden fetters: The gold standard and the Great Depression, 1919–1939*. Oxford University Press.
- Eichengreen, B. (2008). *Globalizing capital: A history of the international monetary system* (2nd ed.). Princeton University Press.
- Findlay, R., & O'Rourke, K. H. (2007). *Power and plenty: Trade, war, and the world economy in the second millennium*. Princeton University Press.
- Food and Agriculture Organization. (2023). *The state of agricultural commodity markets 2023*. FAO.
- Frankel, J. A., & Romer, D. (1999). Does trade cause growth? *American Economic Review*, 89(3), 379–399.
<https://doi.org/10.1257/aer.89.3.379>
- Friedman, T. L. (2005). *The world is flat*. Farrar, Straus and Giroux.

- Grossman, G. M., & Helpman, E. (1991). *Innovation and growth in the global economy*. MIT Press.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2024). *Realisasi investasi Indonesia tahun 2023*. <https://www.bkpm.go.id>
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2009). *International economics: Theory and policy* (8th ed.). Pearson.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2018). *International economics: Theory and policy* (11th ed.). Pearson.
- Milanović, B. (2016). *Global inequality: A new approach for the age of globalization*. Harvard University Press.
- O'Rourke, K. H., & Williamson, J. G. (1999). *Globalization and history: The evolution of a nineteenth-century Atlantic economy*. MIT Press.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Global value chains: Efficiency and risks in the context of COVID-19*. OECD.
- Polanyi, K. (1944). *The great transformation: The political and economic origins of our time*. Beacon Press.
- Reid, A. (1988). *Southeast Asia in the age of commerce, 1450–1680*. Yale University Press.
- Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21(1), 1–33. <https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3>
- Sadono, S. (2004). *Makro Ekonomi*. PT Rajawali Press. Jakarta
- Salvatore, D. (2013). *International economics* (11th ed.). Wiley.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W. W. Norton & Company.

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2023). *World investment report 2023*. <https://unctad.org>
- Viner, J. (1950). *The customs union issue*. Carnegie Endowment for International Peace.
- Williamson, J. (1990). *What Washington means by policy reform*. Institute for International Economics.
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. World Bank.
- World Bank. (2023). *World development report 2023: Migrants, refugees, and societies*. <https://www.worldbank.org>
- World Bank. (2024). *World development report 2024: The great reversal*. World Bank.
- World Trade Organization. (2023). *World trade statistical review 2023*. <https://www.wto.org>

PROFIL PENULIS



Prof. Dr. Ir. Saidin Nainggolan, M.Si merupakan dosen tetap yang mengajar pada program diploma 3, program strata 1, program strata 2 dan program strata 3 pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Penulis merupakan guru besar dengan bidang ilmu EKONOMI PRODUKSI. Penulis mengampu mata kuliah pada semester ganjil: Matematika dasar, Statistika, Ilmu ekonomi dan Ekonomi produksi pada semester genap mengasuh mata kuliah Matematika ekonomi, Akuntansi, Statistika non parametrik, dan Ekonometrika. Penulis telah melakukan penulisan 3 buah buku referensi yang ditulis bersama yaitu: *Pertumbuhan ekonomi dan perpajakan* (2024), *Dasar dasar manajemen* (2024), *Teori ekonomi produksi pendekatan teoritis dan kuantitatif* (2024) dan 15 *Book Chapter*. Penulis aktif sebagai pengelola jurnal dan reviewer pada jurnal JSEB (Jurnal Sosial Ekonomika Bisnis), dan JALOW (Journal Agribussines Local Of Wisdom) dan jurnal pengabdian pada masyarakat (Gentala Arasy). Penulis juga aktif diberbagai seminar nasional dan konferensi dan aktif sebagai anggota PERHEPI (Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia) Email: saidin_nainggolan64@gmail.com

BAB 8

TRANSFORMASI KEBIJAKAN PUBLIK MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: PERSPEKTIF EKONOMI DAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Wilianita Selviana Pangetty, SE.,M.Ak

Universitas Kristen Tentena

A. PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan. Dalam proses tersebut, kebijakan publik memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi instrumen pemerintah dalam menentukan arah pembangunan, mengalokasikan sumber daya, menyediakan pelayanan publik, serta menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, kualitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam merumuskan program, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat yang nyata, merata, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Perubahan lingkungan ekonomi, sosial, teknologi, dan ekologis telah mendorong terjadinya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pencapaian output jangka pendek. Persoalan seperti Perubahan iklim, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, serta keterbatasan sumber daya alam serta tuntutan terhadap pelayanan publik yang berkualitas menunjukkan bahwa pembangunan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan hal ini menjadi tantangan besar bagi pembangunan dunia saat ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, konsep Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) perlu dikembangkan dalam skema transformasi kebijakan publik sebagai upaya memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya. Kebijakan publik perlu diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, dan lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Dimana Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menyangkut pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemerintah memegang peranan penting melalui kebijakan publik yang mampu mendorong pembangunan yang berorientasi jangka panjang. Di sisi lain, keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan akuntabel. Akuntansi sektor publik menjadi instrumen penting dalam pengukuran kinerja pemerintah, pelaporan penggunaan anggaran, serta evaluasi dampak kebijakan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Hal ini menjadi penting dan relevan dengan perlu didorongnya transformasi kebijakan publik menjadi sebuah kebutuhan. Transformasi tidak sekadar berarti perubahan kebijakan atau program pemerintah, tetapi mencakup perubahan cara pandang, proses perumusan kebijakan, mekanisme implementasi, sistem pengawasan, hingga evaluasi dampak kebijakan. Kebijakan publik dituntut semakin adaptif terhadap perubahan, berbasis data dan bukti, partisipatif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dan dampak. Pemerintah perlu membangun tata kelola yang mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap proses pengambilan keputusan publik.

Perspektif ekonomi memberikan landasan penting dalam memahami transformasi tersebut. Setiap kebijakan publik pada dasarnya memiliki konsekuensi terhadap penggunaan dan distribusi sumber daya ekonomi. Kebijakan mengenai anggaran negara dan daerah, investasi publik, perpajakan, subsidi, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, hingga pengelolaan sumber daya alam akan memengaruhi aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, analisis ekonomi diperlukan untuk menilai apakah suatu kebijakan mampu menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang ditimbulkan, sekaligus memastikan bahwa sumber daya publik digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan secara optimal.

Di sisi lain, akuntansi sektor publik memiliki peranan penting dalam mendukung transformasi kebijakan publik melalui penyediaan informasi keuangan yang relevan, transparan, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme tata kelola

publik. Informasi yang dihasilkan melalui sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dapat digunakan untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi kinerja, serta pengambilan keputusan. Dengan demikian, akuntansi sektor publik menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Hubungan antara kebijakan publik, ekonomi, dan akuntansi sektor publik semakin penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Anggaran publik, misalnya, tidak seharusnya hanya dilihat sebagai dokumen keuangan tahunan, tetapi sebagai instrumen kebijakan yang mencerminkan prioritas pembangunan pemerintah. Alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan lingkungan, dan penguatan kelembagaan menunjukkan bagaimana kebijakan publik diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan perlu dinilai tidak hanya berdasarkan seberapa besar anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi juga berdasarkan manfaat, hasil, dan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan terhadap transformasi kebijakan publik semakin relevan seiring dengan kompleksitas tantangan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Desentralisasi memberikan ruang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayahnya. Namun, kewenangan tersebut juga menuntut adanya peningkatan kapasitas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan evaluasi pembangunan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki benar-benar diarahkan

untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Pada tingkat daerah, pembangunan berkelanjutan juga perlu mempertimbangkan potensi dan karakteristik lokal. Daerah yang memiliki sumber daya pertanian, perikanan, pariwisata, kehutanan, pertambangan, maupun potensi ekonomi masyarakat perlu mengembangkan kebijakan yang mampu menciptakan nilai tambah tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif pemerintah, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun ekosistem ekonomi lokal, memperkuat kelembagaan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kemandirian ekonomi daerah.

Salah satu contoh yang dapat digunakan untuk melihat hubungan tersebut adalah pengelolaan Dana Desa. Dana Desa merupakan instrumen kebijakan publik yang diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Pengelolaannya memiliki keterkaitan yang kuat dengan pembangunan berkelanjutan karena penggunaan dana dapat diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar, pengurangan kemiskinan, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, keberhasilan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disalurkan, melainkan juga oleh kualitas perencanaan, ketepatan penggunaan anggaran, transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan pemerintah desa dalam mengukur hasil dan dampaknya bagi masyarakat.

Dengan demikian, transformasi kebijakan publik membutuhkan pendekatan yang mampu menghubungkan proses perumusan

kebijakan dengan pengelolaan sumber daya dan pengukuran kinerja. Perspektif ekonomi membantu menjelaskan bagaimana sumber daya publik dialokasikan dan bagaimana kebijakan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, akuntansi sektor publik menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pengendalian, dan evaluasi penggunaan sumber daya publik. Keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam membangun kebijakan publik yang efektif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Pembahasan mengenai transformasi kebijakan publik juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma tata kelola pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk bergerak dari pola pengelolaan yang berorientasi pada input dan prosedur menuju tata kelola yang lebih berorientasi pada outcome dan impact. Keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah program yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi harus dilihat dari perubahan kondisi masyarakat yang dihasilkan. Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus bagian penting dalam proses pembangunan, sehingga partisipasi, kolaborasi, keterbukaan informasi, dan pengawasan publik menjadi unsur yang semakin penting.

Atas dasar pemikiran tersebut, pembahasan mengenai Transformasi Kebijakan Publik Menuju Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Ekonomi dan Akuntansi Sektor Publik menjadi penting untuk dikembangkan. Kajian ini diarahkan untuk memahami bagaimana kebijakan publik dapat ditransformasikan agar lebih responsif terhadap dinamika pembangunan, bagaimana perspektif ekonomi dapat digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan, serta bagaimana akuntansi sektor publik dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya

publik. Integrasi ketiga perspektif tersebut diharapkan dapat memberikan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif dalam mendorong kebijakan publik yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pemerataan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

B. KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Beberapa ahli menyampaikan bahwa Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan pemerintah yang dirancang untuk menyelesaikan masalah publik dan mencapai tujuan pembangunan tertentu. Kebijakan publik mencakup:

- a. Penyusunan regulasi
- b. Perencanaan pembangunan
- c. Penganggaran
- d. Implementasi program pemerintah
- e. Evaluasi kebijakan

Menurut teori administrasi publik, kebijakan publik memiliki siklus:

1. Identifikasi masalah
2. Penyusunan agenda
3. Formulasi kebijakan
4. Implementasi
5. Evaluasi

Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada dukungan anggaran, kelembagaan, serta sistem pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Guampe, Felix dkk. (2025). *Tata Kelola APBDesa Teori dan Praktik di Tingkat Desa*. Purbalingga. Eureka Media Aksara
- L. Judijanto, dkk. (2025). *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*. Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- M Rosana. (2018). *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nastoto, E.S.P. (2024). *Membangun Kebijakan dan Regulasi Berkualitas dengan Pendekatan Evidence Based Policy*. Dinas Kominfo Bangka Belitung. <https://serumpun.babelprov.go.id/>
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media.
- Saad, Kasman Jaya & Ratnawati. (2019). *Titik Nol Demokrasi dan Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Agraris*. Yogyakarta. Wahana Resolusi
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future*.
- Y Prastowo, JA Saputro. (2025). *Akuntansi Sektor Publik 5.0: Transformasi Digital Menuju Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel*. Yogyakarta. Percetakan CV Andi Offset

PROFIL PENULIS



Wilianita Selviana Pangetty, SE.,M.Ak. Penulis merupakan Dosen pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Kristen Tentena. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga sebelumnya menjadi salah seorang penulis pada Buku *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Sulawesi Tengah yang khusus membahas tentang Partisipasi Pemilih dan Efektivitas Anggaran Sosialisasi Pemilu 2019 (Studi Kasus KPU Kabupaten Poso)*. Penulis juga aktif menjadi narasumber maupun fasilitator pada kegiatan sosial kemasyarakatan sekaitan dengan isu atau topik Ekonomi Lingkungan, Kewirausahaan, Transformasi Pemasaran Digital Maupun Demokrasi dan Kepemiluan khususnya penganggaran Pemilu yang efektif dan Efisien.

Email: vibiru@gmail.com

BAB 9

EVALUASI, TANTANGAN, DAN ARAH MASA DEPAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Dr. Andi Herman Jaya, S.E., M.Si.

Universitas Tadulako

A. PENDAHULUAN

Ekonomi pembangunan merupakan bidang kajian yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan persoalan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat. Pada tahap awal perkembangannya, pembangunan ekonomi lebih banyak dikaitkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, akumulasi modal, industrialisasi, dan produktivitas. Namun, paradigma tersebut kemudian berkembang karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu secara otomatis menghasilkan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi pembangunan modern semakin menempatkan pengurangan kemiskinan, pemerataan, pembangunan manusia, kesempatan kerja, kualitas kelembagaan, transformasi struktural, inovasi, dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian penting dari proses pembangunan. World Bank (2024) menegaskan bahwa negara-negara berpendapatan menengah perlu melakukan transformasi strategi pembangunan dari sekadar mengandalkan investasi menuju kombinasi investasi, adopsi dan penyebaran teknologi (*infusion*), serta

inovasi, agar mampu meningkatkan produktivitas dan menghindari *middle-income trap*. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak lagi cukup dipahami sebagai proses peningkatan output nasional, tetapi sebagai proses multidimensional yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Evaluasi pembangunan menjadi semakin penting karena keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya diukur berdasarkan pencapaian indikator makroekonomi seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), investasi, atau pendapatan per kapita. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses terhadap pelayanan dasar. World Bank (2024) menunjukkan bahwa banyak negara berpendapatan menengah memang telah mengalami peningkatan pendapatan dan berhasil mengurangi kemiskinan, tetapi sebagian besar masih menghadapi kesulitan untuk melakukan transisi menuju tingkat pendapatan tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap kualitas pertumbuhan, produktivitas, pemerataan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kemampuan institusi dalam mendukung transformasi ekonomi. Evaluasi pembangunan bukan sekadar kegiatan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu program, tetapi merupakan instrumen untuk mengidentifikasi kesenjangan, memperbaiki kebijakan, dan memastikan bahwa pembangunan menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat (World Bank, 2024).

Urgensi evaluasi semakin meningkat karena lingkungan ekonomi global dan nasional mengalami perubahan yang cepat dan kompleks.

Perekonomian global saat ini dihadapkan pada ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, meningkatnya utang, perubahan demografi, perubahan iklim, tekanan transisi energi, serta perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI). World Bank (2024) menyatakan bahwa negara-negara berpendapatan menengah menghadapi tekanan yang semakin besar akibat meningkatnya proteksionisme, perubahan demografi, beban utang, serta tuntutan untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Pada saat yang sama, perkembangan AI dan transformasi digital menciptakan peluang sekaligus risiko baru bagi pembangunan manusia. UNDP (2025) menempatkan AI sebagai salah satu faktor yang berpotensi mengubah pilihan, kemampuan, produktivitas, dan kehidupan manusia, sehingga pemanfaatan teknologi perlu diarahkan untuk memperluas kapabilitas manusia, bukan sekadar mengejar kemajuan teknologi. Dalam konteks tersebut, Indonesia menghadapi tantangan untuk mempertahankan pertumbuhan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, daya saing, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, perubahan lingkungan global dan nasional menuntut perencanaan pembangunan yang semakin adaptif, berbasis data, inovatif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan (World Bank, 2024; UNDP, 2025).

Berdasarkan perkembangan tersebut, “Evaluasi, Tantangan, dan Arah Masa Depan Ekonomi Pembangunan” bertujuan memberikan pemahaman mengenai capaian pembangunan ekonomi, berbagai tantangan dihadapi, serta arah strategis pembangunan dalam menghadapi perubahan lingkungan ekonomi masa depan. Pembahasan dalam bab ini mencakup evaluasi pembangunan berdasarkan aspek pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, kesempatan kerja, pembangunan manusia, transformasi struktural,

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Laporan Perekonomian Indonesia 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2024). *Pemantauan Perkembangan Pembangunan Wilayah dan Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru dalam Mendukung Transformasi Ekonomi Wilayah Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJPN 2025–2045 secara hukum ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024.
- Bappenas. (2025). *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini mencakup narasi RPJMN, matriks pembangunan, dan arah pembangunan kewilayahan.
- Bappenas. (2026). *Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini menjadi acuan transformasi pemerintahan digital berbasis data dan mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.
- Kraay, A., Lakner, C., Özler, B., Decerf, B. M. A., Jolliffe, D., Sterck, O., & Yonzan, N. (2023). A new distribution-sensitive index for

measuring welfare, poverty, and inequality. *World Bank Policy Research Working Paper No. 10470*. Washington, DC: World Bank.

Mursalin, D., & Irawan, T. (2025). Balancing regional growth, equity, and spatial: The dilemma of decentralization in Indonesia's development. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 58–82. <https://doi.org/10.29244/jekp.14.1.2025.58-82>

OECD. (2025). *Government at a Glance 2025*. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2026). *Digital Government Outlook 2026: From Foundations to Transformational Impact*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0496b2bc-en>

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Harlow: Pearson.

United Nations Development Programme (UNDP). (2025). *Human Development Report 2025: A Matter of Choice—People and Possibilities in the Age of AI*. New York: United Nations Development Programme.

World Bank. (2024a). *Indonesia Economic Prospects: Funding Indonesia's Vision 2045*. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2024b). *Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024: Pathways Out of the Polycrisis*. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2024c). *World Development Report 2024: The Middle-Income Trap*. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2025a). *Indonesia Economic Prospects: People-First Housing—A Roadmap from Homes to Jobs to Prosperity in Indonesia*. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2025b). *Indonesia Economic Prospects: Digital Foundations for Growth*. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2025c). *Indonesia Growth & Jobs Report: Running Faster, for Longer—Structural Transformation, Productivity, and Good Jobs*. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2026). *Indonesia Economic Prospects: Managing Risks, Unlocking Productivity*. Washington, DC: World Bank.

PROFIL PENULIS



Dr. Andi Herman Jaya, S.E., M.Si

Andi Herman Jaya, lahir di Teko-Teko/Bone Pada tahun 1975, menamatkan Sekolah Dasar pada Tahun 1987 di SDN No 216 Barebbo Kabupaten Bone, kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 3 Watampone Kabupaten Bone dan tammat pada Tahun 1990, setelah itu melanjutkan sekolah ke SMEA Negeri Watampone dan tammat pada Tahun 1993, setelah itu kuliah S1 di Fakultas Ekonomi yang sekarang menjadi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tadulako tepatnya pada Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan dan tammat pada Tahun 2000, kemudian melanjutkan studi pada Program Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan dan tammat pada Tahun 2012, selanjutnya menempuh Pendidikan S3/Program Doktor Ilmu Ekonomi dan selesai pada Juni 2026. Sampai saat ini aktif mengajar sebagai Dosen Tetap/PNS di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tadulako, dan mengajar beberapa Mata Kuliah di antaranya; Pengantar Ekonomi Mikro, Pengantar Ekonomi Makro, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Publik I, Ekonomi Moneter I, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Manajemen Perbankan, Kajian Lingkungan Hidup.

Email: andibatara.herman@gmail.com

EKONOMI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Buku ini menghadirkan pembahasan secara sistematis mengenai hakikat dan ruang lingkup ekonomi pembangunan, sejarah dan dinamika kebijakan pembangunan nasional Indonesia, kemiskinan dan ketimpangan beserta kebijakan penanggulangannya, modal manusia melalui pendidikan dan kesehatan, pembangunan pertanian dan industri, pembiayaan pembangunan dan kebijakan fiskal, integrasi ekonomi global serta dampaknya bagi negara berkembang, hingga evaluasi, tantangan, dan arah masa depan ekonomi pembangunan. Rangkaian pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai pembangunan, mulai dari landasan konseptual hingga persoalan dan kebijakan yang dihadapi dalam praktik.

Di tengah dinamika perubahan ekonomi global, transformasi teknologi, persoalan ketimpangan, perubahan iklim, serta tuntutan terhadap pembangunan yang semakin inklusif dan berkelanjutan, kajian mengenai ekonomi perencanaan dan pembangunan menjadi semakin penting. Perencanaan pembangunan tidak lagi cukup hanya berorientasi pada peningkatan indikator ekonomi makro, tetapi juga perlu mempertimbangkan kualitas pertumbuhan, pemerataan kesempatan, pembangunan manusia, ketahanan ekonomi, kualitas kelembagaan, serta keberlanjutan lingkungan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, akademisi, peneliti, praktisi, perencana pembangunan, pengambil kebijakan, serta masyarakat umum yang ingin memahami berbagai aspek ekonomi perencanaan dan pembangunan. Akhir kata, semoga buku "Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan" ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta menjadi salah satu referensi dalam memahami dan merumuskan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan.



CV. Tahta Media Group

Sukeharjo, Jawa Tengah

Web : www.tahtamedia.co.id

Ig : tahtamediagroup

Telp/WA : +62 896 5427 3996

